

RENCANA KERJA (RENJA)



BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Sekretariat Daerah Provinsi Maluku

2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintah yang sesungguhnya adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan *good governance*.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan dengan mengacu pada usulan RKPD, Renstra Sekretariat Daerah dan Revisi RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi program dan Kegiatan di tahun 2022, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.138.008.974.036,- (Seratus tiga puluh delapan milyar delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.136.588.806.844,- (Seratus tiga puluh enam milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dengan presentase sebesar 98,97% dan yang tidak terrealisasi sebesar Rp.1.420.167.192,- (Satu milyar empat ratus dua puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu serratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan presentase sebesar 1,03%.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku menyampaikan Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024 mengacu pada program kegiatan dan penganggaran sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2023.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku.

2. Tujuan

Untuk mengetahui Rencana Kerja (Renja) yang dijabarkan dalam program kerja sesuai pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, Sasaran dan Program kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang diemban Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku.

D.Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2022
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- B. Program dan Kegiatan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- C. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategi Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku. Visi Pemerintah Provinsi Maluku yang dikembangkan sebagai acuan yang akan memayungi dan mengarahkan berbagai program Kesejahteraan Masyarakat pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Setda dalam kurun waktu 2019-2024 yaitu ;

“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ”.

Visi diatas pada hakekatnya mencerminkan tanggungjawab Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Setda dalam mendukung program kerja pimpinan Daerah. Untuk mewujudkan Visi diatas maka ditetapkan misi sebagai berikut ;

- Maluku yang dikelola secara jujur, bersih dan melayani
- Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan
- Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan

Untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019-2024, ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

Dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah di atas, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.138.008.974.036,- (Seratus tiga puluh delapan milyar delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.136.588.806.844,- (Seratus tiga puluh enam milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dengan presentase sebesar 98,97%.

Selanjutnya berkaitan dengan pencapaian target Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun 2022 dapat di gambarkan pada table T-C.29 berikut ;

Tabel T-C.29

KODE	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ...	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun ...	Target dan realisasi Kinera Program dan kegiatan tahun ...			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1...	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)...	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	01	01								
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
4	01	01	1.05							
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
4	01	01	1.05	09						
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan						
4	01	01	1.06							
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4	01	01	1.06	02						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						
4	01	01	1.06	03						
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						
4	01	01	1.06	04						
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
4	01	01	1.06	05						
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						
4	01	01	1.06	09						
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
4	01	01	1.08							
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan											
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan											
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya											
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara											
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan												
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara											
4	01	04			Program Kesejahteraan Rakyat												
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual												
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola											
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi											
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar												
4	01	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan											

B. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Setda

Adapun Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku adalah sebagai berikut : Pengukuran capaian kinerja oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku pada.

Tabel-T-C 30

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kebijakan Kesra yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku antara lain:

1. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dibidang kesejahteraan rakyat dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat.
2. Masih terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar SKPD, sehingga terjadi ketimpangan dalam penanganan masalah/program dan kegiatan.

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

N O	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan public (ASN) belum professional dalam melayani masyarakat sebagai upaya untuk mencapai <i>feel good service</i> baik bagi masyarakat	Rendahnya sikap tanggungjawab dalam pekerjaan, ditunjukkan lewat sikap tidak tepat waktu dan tidak mampu menyelesaikan tugas hingga tuntas	Masih rendahnya kemampuan ASN untuk memiliki ketrampilan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang dan jenjangnya masing-masing
2	Penyebarluasan dan Publikasi penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk transparansi belum berjalan dengan baik	Belum optimalnya tata Kelola layanann pemerintah dalam penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan publikasi Belum	Kapasitas aparatur yang masih rendah dan sarana prasarana pendukung yang masih minim dan belum memadai serta kepemilikan SOP Terbatas

		optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media publikasi	nya fasilitas pendukung pemanfaatan teknologi informasi
3	Belum terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum	Belum maksimalnya penerapan PATEN di Kabupaten/Kota
			Belum terselesaikannya permasalahan penegasan batas-batas wilayah di Provinsi Maluku
			Belum optimalnya proses pengadministrasian wilayah administrasi pemerintahan dan Kawasan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
		Belum	Belum

		optimalnya pelaksanaan otonomi Daerah dan kerjasama Daerah	optimalnya penyusunan dokumen LPPD sesuai ketentuan
			Belum maksimalnya penerapan SPM dalam pengintegrasian indicator SPM dalam dokumen perencanaan
			Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, sehingga alur/tahapan pelaksanaan perjanjian kerjasama masih mengalami kendala
		Kapasitas Sumber Daya Manusia belum	Rendahnya pemahaman ASN dalam

		memadai	pengua aan teknologi dan legitalasi
--	--	---------	---

Dari permasalahan dan hambatan yang telah disampaikan maka ini juga berdampak pada tata kelola Pemerintahan yang dimanifestasikan dalam berbagai skala baik berupa Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang kurang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dalam memberikan respon, kolaboratif dan komunikasi, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif sehingga tidak maksimal dalam mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani sebagaimana yang telah tercantum dalam Visi dan Misi Kepala Daerah.

Ini merupakan tantangan, sehingga peluang yang dapat diambil dalam upaya meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah yang perlu diambil oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi guna menyamakan persepsi sebelum melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.
- b. Melakukan cek dan ricek kesiapan teknis operasional dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk ikut serta dalam penyelesaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.
- c. Perlu adanya pelatihan atau bimtek bagi sumber daya manusia sesuai Tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku.

Diakui bahwa belum sepenuhnya masalah dan hambatan pencapaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2022 telah teratasi. Oleh karenanya akan tetap mendapat perhatian pada tahun berikutnya.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Setda

NO	Rancangan Awal RKPd				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator/Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	4		5		4			5		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	15	176.700.000	Luar Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	10	117.800.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ambon	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	194.589.008	Kota Ambon	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	194.589.008	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Ambon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5.431.000	Kota Ambon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	4.431.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ambon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	89.676.800	Kota Ambon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	79.576.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Ambon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	31.903.000	Kota Ambon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	29.883.050	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	152.950.000	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	152.950.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ambon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	9.000.000	Kota Ambon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	8.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	44.160.000	Kota Ambon	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	44.160.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kota Ambon	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	39.140.000	Kota Ambon	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	1	39.140.000	

	Kendaraan Dinas Jabatan						pajaknya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Ambon	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3	5.000.000	Kota Ambon	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3	5.000.000	
	Fasilitas Keprotokolan									
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kota Ambon	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	4	1.500.000.000	Kota Ambon	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	4	1.289.107.008	
	Program Kesejahteraan Rakyat									
	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual									
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	11 Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	115.000.000.00 0	11 Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	98.466.959.06 4	HIBAH
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	11 Kab/Kota	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	3.000.000.000	11 Kab/Kota	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	2.000.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.	Kota Ambon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	564.000.000	Kota Ambon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	250.991.464	

	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Mekkah, Yerusalem, India, Vatikan, Roma dan 11 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4	3.000.066.616	Mekkah, Yerusalem, India, Vatikan, Roma dan 11 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4	3.000.066.616	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	10	648.000.000	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	10	400.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar									
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan	5	468.241.120	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi,	5	468.241.120	

	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kota Ambon, Jakarta, Jogjakarta, Malang, Salatiga, Bandung, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	3.804.704.870	Kota Ambon, Jakarta, Jogjakarta, Malang, Salatiga, Bandung, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	2.804.704.870	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Setda

Untuk membangun hubungan yang sinergis berdasarkan fungsi dan kewenangannya, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Setda memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis terutama dalam melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat dan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat menjalankan roda Pemerintahan Daerah.

Tujuan dan Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sehingga tujuan dan sasaran ini merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sedangkan sasaran ialah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program masing-masing bidang.

Beranjak dari Visi *“Maluku yang dikelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”* dan Misi ke - 1 *“Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani”* maka yang menjadi Tujuan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Setda ialah ;

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan

Dengan Sasaran yakni ;

1. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
2. Terwujudnya kolaborasi antar pemerintah dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

B. Program dan Kegiatan

Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah diukur dari pencapaian yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama Daerah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Setda, yakni Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang didukung melalui Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Setda.

C. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan tahun 2023 pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Setda meliputi 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp.109 356.000.000,- dengan pembagian pada masing-masing Kegiatan/Sub kegiatan sebagai berikut ;

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KET.
2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	117.800.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.589.008	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.431.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.576.800	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.883.050	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.950.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.160.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.140.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
Fasilitasi Keprotokolan		
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.289.107.008	
Program Kesejahteraan Rakyat		
Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual		
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	98.466.959.064	HIBAH
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	2.000.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.	250.991.464	
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3.000.066.616	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan	400.000.000	

Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	468.241.120	
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2.804.704.870	
JUMLAH	109.356.000.000,-	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Kerja

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Setda, dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Sasaran Kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk menunjang Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku mempunyai tugas: “ Membantu Asisten Kesejahteraan Sosial Dan Administrasi Umum dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta pelayanan administrative di bidang kesejahteraan rakyat”.

B. Pendanaan dan Program Kegiatan

Pendanaan Program dan kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Setda merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun.

Sasaran Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2024 adalah untuk mencapai hasil dari program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku.

RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Unit : 4.015.06.5.07.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi
Sub Unit : 4.015.06.5.07.01.0004 BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Organisasi

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen						
4	01	01	1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Orang	Luar Daerah	10	117.800.000	APBD	10	123.690.000
4	01	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								

4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	Kota Ambon	1	194.589.008	APBD	1	204.318.458
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kota Ambon	1	4.431.000	APBD	1	4.652.550
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Ambon	1	79.576.800	APBD	1	83.555.640
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kota Ambon	1	29.883.050	APBD	1	31.377.203
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Luar Daerah	10	152.950.000	APBD	12	160.597.500
4	01	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kota Ambon	12	8.400.000	APBD	12	8.820.000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	Kota Ambon	12	44.160.000	APBD	12	46.368.000

4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Kota Ambon	1	39.140.000	APBD	1	41.097.000
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	Kota Ambon	3	5.000.000	APBD	3	5.250.000
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Laporan	Kota Ambon	4	1.289.107.008	APBD	4	1.353.562.358
4	01	04			Program Kesejahteraan Rakyat								
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual								
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	11 Kab/Kota	1	98.466.959.064	APBD	1	103.390.307.017

4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	lembaga	11 Kab/Kota	1	2.000.000.000	APBD	1	2.100.000.000
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar								
4	01	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	Kota Ambon	1	250.991.464	APBD	1	263.541.037
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	Mekkah, Yerusalem, India, Vatikan, Roma dan 11 Kab/Kota	4	3.000.066.616	APBD	4	3.150.069.947
4	01	04	1.02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	Kab/Kota	10	400.000.000	APBD	10	420.000.000

4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar									
4	01	04	1.03	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	Kab/Kota	5	468.241.120	APBD	5	491.653.176	
4	01	04	1.03	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	Kota Ambon, Jakarta, Jogjakarta, Malang, Salatiga, Bandung, Makassar	1	2.804.704.870	APBD	1	2.944.940.114	
					TOTAL						109.356.000.000			114.823.800.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai perwujudan dari kebijakan program Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024, dengan harapan agar rencana kerja ini dapat memberikan dampak yang positif dan perubahan bagi peningkatan dan pengembangan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian rencana kerja Program dan Kegiatan tahun anggaran 2024 pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku agar dapat dilaksanakan dan outputnya sesuai tujuan RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2019-2024.

Ambon, Maret 2023

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Maluku,



Drs. A. I. Muhammad, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650709 199203 1 015